

# ***The Controversy of the Free Meal Programme in the General Election 2024 in Indonesia***

## **Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis dalam Pemilu 2024 di Indonesia**

**Melati Dama<sup>1\*</sup>, Ayu Dewi Mayasari<sup>2</sup>, Lisbet Situmorang<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Program Studi Pembangunan Sosial, Universitas Mulawarman

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received: April 18, 2025

Revised: June 22, 2025

Accepted: July 27, 2025

#### **Kata Kunci:**

Demokrasi pasca-reformasi; Pemilu 2024; Kebijakan sosial; Populisme; Program Makan Bergizi Gratis.

#### **Keywords:**

Post-reform democracy; General Election 2024; Social policy; Populism; Free Nutritious Meal Program



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

masyarakat sipil, yang menyoroti kecenderungan instrumentalitas kebijakan sosial demi kepentingan elektoral. Penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lanjutan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari politisasi kebijakan sosial terhadap kepercayaan publik, akuntabilitas demokrasi, dan integritas distribusi kesejahteraan dalam demokrasi Indonesia yang terus berkembang.

### **ABSTRACT**

*The development of democracy in post-reform Indonesia shows dynamic conditions, including the widespread use of social policy as an electoral political tool. The controversy over this phenomenon is still rarely studied in depth in academic discourse. The 2024 general election in Indonesia is a clear example of the escalation of the use of social programmes as political instruments, a hallmark of post-reform democracy. This research focuses on the political construction and contestation of the Free Nutritious Meal (MBG) programme during the 2024 Presidential Election campaign. Using a descriptive qualitative approach and case study method, this research analyses how the MBG programme was produced, debated and disseminated through online media coverage during the official campaign period. The results showed two main findings. First, the MBG programme became a populist narrative that was strategically leveraged to increase the electability of candidates. Second, the programme generated widespread criticism from the public and civil society groups, highlighting the tendency of social policy instrumentality for electoral purposes. This research recommends the need for further studies to explore the long-term impact of social policy politicisation on public trust, democratic accountability, and the integrity of welfare distribution in Indonesia's evolving democracy.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [melati.dama@fisip.unmul.ac.id](mailto:melati.dama@fisip.unmul.ac.id)

## PENDAHULUAN

Demokrasi pasca-Reformasi di Indonesia memasuki era baru di mana kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan melibatkan berbagai aktor dalam perumusan kebijakan. Sejak Reformasi 1998, desentralisasi dan fragmentasi kekuasaan telah menciptakan ruang bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memanfaatkan kebijakan sosial sebagai alat menarik pemilih (Rahmatunnisa, 2015; Salsabila Zahratu et al., n.d.). Namun, dalam perkembangannya, demokrasi elektoral kerap menjadikan kebijakan sosial sebagai alat untuk memperoleh simpati pemilih, bukan semata sebagai upaya pemenuhan hak-hak warga negara. Program-program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan dukungan politik (Pratiwi, 2021; Sihidi et al., 2019). Kebijakan tidak lagi hanya dipandang dari aspek teknokratis dan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari arena kontestasi wacana kekuasaan. Hal ini terlihat dalam berbagai janji kampanye yang berorientasi pada populisme dan kepentingan elektoral.

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada konteks Indonesia tetapi juga terlihat di banyak negara, seperti Brasil dan Filipina, yang mengadopsi strategi serupa dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui kebijakan sosial. Penyebaran praktik politik klienal dan patronase memengaruhi banyak negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, di mana hubungan langsung antara politisi dan pemilih sangat kuat. Misalnya di Brasil, penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial sering kali digunakan sebagai mekanisme untuk membangun loyalitas politik di kalangan konstituen (Brown et al., 2011; Nieto-Matiz & Skigin, 2020). Praktik semacam ini, meskipun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak, dapat mengaburkan batas-batas tata kelola yang etis dan menggeser wacana politik menuju klientelisme dan patronase, di mana pemilih merasa berkewajiban membalas bantuan yang diterima dengan dukungan suara (Blattman et al., 2018). Studi (Ezrow & Krause, 2022), menunjukkan bahwa kehadiran program sosial pemerintah berkontribusi pada peningkatan tingkat kehadiran dalam memilih, meskipun juga menyebabkan tingginya angka suara tidak sah.

Kampanye politik di Indonesia, terutama dalam konteks pasca-Reformasi, sering kali diwarnai oleh janji-janji populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan tunai, layanan pendidikan, dan program makan gratis. Janji-janji tersebut berfungsi sebagai strategi untuk membangun citra calon pemimpin yang peduli terhadap rakyat kecil. Sebagai contoh, program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga digunakan sebagai alat politik untuk menarik dukungan pemilih (Hadiz & Robison, 2005; McCarthy & Sumarto, 2018).

Janji-janji tersebut tampak menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, namun sering tidak disertai dengan kesiapan implementasi kebijakan yang baik, baik dari sisi teknis maupun fiskal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas kebijakan yang ada (Fleckenstein, 2010; Hadiz & Robison, 2005). Banyak calon pemimpin yang mengandalkan populisme untuk memperkuat posisi mereka, dengan harapan bahwa janji-janji tersebut dapat memengaruhi persepsi publik tanpa adanya komitmen yang jelas untuk memenuhi janji tersebut setelah terpilih (Wijanarko, 2021). Dalam konteks ini, program sosial menjadi simbol dari "kedekatan" kandidat dengan rakyat, alih-alih hasil dari proses perencanaan kebijakan berbasis kebutuhan struktural.

Maka, tidak mengherankan jika janji populis dalam kampanye menjadi sumber perdebatan yang intens di ruang publik.

Kebijakan sosial di Indonesia mengalami transformasi dari tujuannya yang ideal, yakni untuk mendistribusikan kesejahteraan menjadi alat untuk strategi politik jangka pendek. Dalam konteks politik elektoral, kebijakan sosial sering dipolitisasi demi meraih dukungan pemilih, dan hasilnya adalah terciptanya ambiguitas antara niat tulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan motif politik tertentu (Grehenson, 2014). Oleh karena itu, penting untuk melihat kebijakan sosial juga sebagai wacana politik yang diproduksi dalam medan kekuasaan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat sebagai salah satu program utama yang diusung oleh pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 (Gerindra.id, 2023). Program ini diklaim bertujuan untuk mengatasi persoalan gizi anak dan pendidikan, dengan menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat, termasuk siswa pra-sekolah, SD, SMP, SMA, pesantren, serta ibu hamil dan anak balita di Indonesia (Advertorial, 2024; Puspapertiwi & Nugroho, 2024). Sejak awal kemunculannya, MBG telah mengundang perhatian publik secara luas, menjadi simbol dari janji kampanye yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, dengan daya tarik politis yang kuat terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat kelas bawah. Program ini juga menjadi penanda strategi kampanye yang ingin menggabungkan isu sosial dan daya mobilisasi electoral (Nushratu, 2024; Salam, 2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat sebagai isu sentral dalam Pemilu 2024, terutama setelah dibahas secara intensif dalam debat calon presiden dan kampanye media sosial. Popularitas program ini tidak terlepas dari narasinya yang sederhana namun berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Seiring dengan jalannya kampanye, pemberitaan mengenai MBG menyebar luas di media daring, menciptakan gelombang diskusi dan perdebatan. Program MBG menandai pergeseran tren populisme di Indonesia dari politik identitas yang dominan pada Pemilu 2014 dan 2019, menuju politik kesejahteraan berbasis kebijakan sosial.

Hadirnya wacana ini memperlihatkan adaptasi elit politik terhadap perubahan preferensi pemilih yang semakin pragmatis. Kampanye politik berbasis kesejahteraan kerap menjadi strategi yang efektif dalam menarik pemilih. Banyak politisi menggunakan program-program sosial sebagai komponen kunci dalam kampanye mereka, dengan harapan menggugah perasaan dan aspirasi masyarakat terhadap kesejahteraan. Dengan adanya kebangkitan populisme, janji-janji ini menjadi lebih menarik ketika disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan langsung, menciptakan kesan bahwa kandidat memahami kebutuhan pokok rakyat (Arsyad et al., 2023; Ekawati, 2019).

Meskipun politisasi kebijakan sosial dalam pemilu telah menjadi fenomena global, kajian mendalam tentang konstruksi politik, kontestasi wacana, dan peran media daring dalam konteks Pemilu Indonesia 2024 masih terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada dampak money politics atau politik identitas (Mietzner, 2014), sementara analisis tentang pembentukan narasi kebijakan sosial sebagai alat kampanye khususnya dalam bentuk program spesifik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) belum banyak dieksplorasi. Padahal, Pemilu 2024 menawarkan konteks unik di mana isu kesejahteraan (seperti MBG) menggeser wacana identitas yang dominan pada pemilu sebelumnya (Pemilu 2019). Studi ini berangkat dari observasi bahwa Pemilu 2024 yang menjadi contoh nyata eskalasi penggunaan program sosial sebagai instrumen politik, namun studi-studi

sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji mekanisme politisasi kebijakan sosial dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia yang dinamis.

Berdasarkan argument di atas studi ini penelitian ini akan menganalisis bagaimana kampanye program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi, diperdebatkan, selama kampanye Pemilu Presiden 2024. Dengan melakukan telaah mendalam pada artikel media online pada masa periode kampanye Pemilu 2024, studi ini bertujuan mengungkap proses konstruksi politik narasi MBG sebagai alat peningkatan elektabilitas kandidat, menganalisis pola kontestasi dan perdebatan public. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami transformasi pola populisme elektoral di Indonesia dari politik identitas menuju politik kesejahteraan

## METODE

Penelitian ini dilakukan dalam konteks meningkatnya kontroversi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan dalam wacana politik nasional Indonesia menjelang Pemilu 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengevaluasi kontroversi yang muncul di seputar program tersebut sebagaimana diproduksi dan disebarluaskan melalui pemberitaan media daring. Seperti yang ditegaskan oleh (Fernando dkk. (2024), isu-isu yang tersebar melalui media daring tidak hanya merepresentasikan kondisi politik faktual, tetapi juga menggambarkan konstruksi wacana kekuasaan yang tengah berlangsung.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan utama. Pertama, program makan bergizi gratis menjadi tema kebijakan publik yang sangat politis dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kedua, kontroversi ini memperlihatkan bagaimana agenda kebijakan sosial dapat menjadi alat dalam reproduksi kekuasaan elektoral. Ketiga, narasi pro dan kontra terhadap program ini dapat mencerminkan kondisi politik patronase dan relasi kuasa negara dalam mengatur distribusi kesejahteraan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah intensif terhadap pemberitaan media daring yang relevan dengan isu program makan bergizi gratis. Penelusuran data dilakukan melalui mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci seperti: "program makan bergizi gratis", "program makan gratis pemilu 2024", "kontroversi makan gratis", dan "politik bantuan sosial". Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan antara 21 Januari hingga 10 Maret 2024, untuk menangkap dinamika wacana yang berkembang selama dan sesudah masa kampanye resmi Pemilu 2024. Periode ini dipilih secara sengaja karena narasi politik mengenai program MBG tidak hanya mencuat pada masa kampanye, tetapi juga mengalami intensifikasi kontroversi setelah pemungutan suara, terutama terkait dengan isu legalitas, anggaran, dan respons kelembagaan.

Ketiga penulis melakukan metode skimming untuk menyaring berita berdasarkan judul dan konten yang mengandung narasi kontroversial terkait program makan bergizi gratis, seperti perdebatan anggaran, kritik terhadap efektivitas kebijakan, politisasi bantuan sosial, serta respons publik di media sosial. Dari hasil penelusuran, diperoleh 1000 artikel berita yang diklasifikasikan ke dalam dua tema besar, yaitu narasi populisme dan elektabilitas kandidat sebanyak 551 artikel berita online, dan kritik publik serta respons dari kelompok masyarakat sipil sebanyak 449 artikel berita online.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh (Miles Matthew et al., 2014), yakni: reduksi data untuk menyusun dan menyaring informasi

berdasarkan kategori tematik yang telah ditetapkan; penyajian data dalam bentuk kutipan naratif dari media daring yang relevan dengan fokus penelitian; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara induktif dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melingkupi narasi-narasi tersebut.

Untuk memperdalam pemaknaan, digunakan pula analisis wacana kritis guna mengungkap bagaimana narasi dalam pemberitaan membentuk makna dan opini publik terkait hubungan antara kebijakan sosial, strategi elektoral, dan legitimasi kekuasaan. Langkah-langkah metodologis ini memungkinkan penelitian menjawab pertanyaan kunci tentang bagaimana program MBG dibingkai secara politis, dikontestasikan dalam ruang publik, serta diposisikan dalam dinamika demokrasi pasca-reformasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Pemilihan umum di Indonesia merupakan peristiwa politik penting yang menarik banyak perhatian, terutama karena menjadi cerminan dinamika demokrasi yang terus berkembang pasca-Reformasi 1998. Salah satu fenomena yang mencolok dalam kontestasi elektoral terakhir adalah menguatnya penggunaan kebijakan sosial sebagai instrumen kampanye politik, sebagaimana terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Pemilu Presiden 2024. Program ini tidak hanya menjadi salah satu isu sentral dalam debat publik, tetapi juga memantik perdebatan sengit mengenai etika politik, akuntabilitas kebijakan publik, dan masa depan demokrasi substantif di Indonesia.

Studi ini berupaya mengurai kompleksitas fenomena tersebut melalui analisis mendalam terhadap bagaimana MBG dikonstruksi sebagai narasi politik, diperdebatkan di ruang publik, serta dipolitisasi dalam konteks pemilu. Temuan penelitian mengungkap pola-pola kritis yang relevan tidak hanya untuk memahami dinamika Pemilu 2024, tetapi juga untuk memetakan tantangan demokrasi elektoral Indonesia ke depan. Berikut adalah deskripsi hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis kualitatif terhadap pemberitaan media daring dan respons publik selama periode kampanye.

### **1. Program Makan Bergizi Gratis sebagai Narasi Populis untuk Elektabilitas Kandidat**

Program makan bergizi gratis muncul sebagai salah satu janji kampanye utama dalam Pemilu 2024, yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada siswa di seluruh Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Program ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan gizi pada anak-anak, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, serta mendukung prestasi akademik. Namun terlepas dari niat baik dan potensi manfaatnya, program ini dinilai memberi dampak elektoral bagi kandidat tertentu (Mietzner, 2014). Sebagai janji kampanye yang menarik perhatian publik, program ini memiliki potensi untuk meningkatkan popularitas dan dukungan bagi kandidat yang mengusungnya. Tabel 1. menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis telah menjadi strategi kampanye populer dalam pemilu 2024 di Indonesia.

Tabel. 1 Narasi Populisme dan Elektabilitas Kandidat

No	Judul & Sumber	Tema/Narasi	Aktor
1	Tujuan Utama Program Makan Siang Gratis ala Prabowo (Ayu, 2024).	Program MBG untuk cegah stunting & gizi buruk (Solusi fundamental Indonesia Emas 2045)	Prabowo Subianto (Kontestan Pemilu 2024)
2	Kampanyekan Program Makan Siang Gratis, Prabowo Targetkan Menang Satu Putaran (Salam, 2024).	Program MBG untuk prestasi siswa (Lahirkan generasi pintar & kompetitif)	Prabowo Subianto (Kontestan Pemilu 2024)
3	Budiman Ungkap Persiapan Program Makan Siang Gratis, Begini Rinciannya (Anggrainy, 2024).	Program MBG tingkatkan industri pangan (Dampak ekonomi masif: 82,9 juta penerima)	Budiman Sudjatmiko, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
4	Program Makan Siang Gratis untuk Anak SD-SMA Bantu Ibu Rumah Tangga (Jogja, 2024).	Program MBG bantu keuangan keluarga (Penghematan belanja pokok ibu rumah tangga)	Airlangga Hartato, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
5	Klarifikasi soal Program Makan Siang Gratis, TKN: Langsung Dijalankan Setelah Prabowo-Gibran Dilantik, (Achmad, 2024).	Program MBG program prioritas (Akan langsung dilaksanakan 2024)	Budisatrio Djiwandono, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
6	Relawan Gibran Sosialisasikan Program Makan Siang Gratis Paslon 02 di Papua (Nushratu, 2024).	Program MBG untuk cegah snating dan gizi buruk	Barisan Relawan For Gibran
7	TKN Prabowo-Gibran Jelaskan Manfaat Program Makan Siang Gratis yang Dkiritik Ganjar Pranowo (Reliubun, 2023).	Program MBG tingkatkan kehadiran & prestasi siswa (Bukti internasional)	Hamdan Hamedan, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Sumber: Berita online yang diolah

Tabel 1. secara komprehensif menganalisis narasi utama yang digunakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam mempromosikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Pemilu 2024. Analisis dilakukan mengenai strategi framing, target elektoral, dan potensi kritik terhadap masing-masing narasi. Data menunjukkan bagaimana tim kampanye secara sistematis membingkai MBG sebagai solusi multiguna yang menjawab berbagai masalah nasional, mulai dari penanganan stunting dan gizi buruk, peningkatan prestasi siswa, penguatan industri pangan, hingga penghematan keuangan keluarga.

Tabel ini menunjukkan pola komunikasi politik yang khas dalam demokrasi elektoral Indonesia, di mana kebijakan publik dikemas sebagai komoditas politik. Narasi-narasi tersebut dirancang dengan cermat untuk menyasar segmen pemilih spesifik - ibu rumah tangga melalui penghematan biaya hidup, pelaku usaha melalui stimulus ekonomi, hingga kalangan pendidikan melalui janji peningkatan kualitas SDM.

## 2. Kontroversi Makan Bergizi Gratis dalam narasi elektoral 2024

Efektivitas program makan bergizi gratis sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas kandidat menimbulkan pertanyaan tentang etika politik dan potensi penyalahgunaan program sosial untuk kepentingan politik. Program makan bergizi gratis telah menjadi isu kontroversial dalam pemilu 2024 di Indonesia, memicu perdebatan sengit di antara para kandidat, partai politik, pengamat politik, dan masyarakat umum. Terdapat kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas program, termasuk bagaimana dana akan dikelola dan didistribusikan, serta bagaimana efektivitas program akan dipantau dan dievaluasi. Tabel. 2 berikut ini akan menggambarkan perbedaan pandangan mengenai dampak program makan bergizi gratis terhadap elektabilitas kandidat dalam pemilu 2024 di Indonesia.

Tabel 2. Kritik dan Respon Masyarakat Sipil

No	Respon terhadap MBG	Narasi	Aktor
1.	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Dana program ini kan besar sekali ya, padahal sebenarnya uang sebanyak itu bisa dialokasikan ke biaya masuk sekolah ke SMA atau kuliah, yang nominalnya masih besar dan jadi 'beban para orang tua (Ramadhanty, 2024).	Masyarakat Sipil
2.	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Oleh karena itu, kami sampaikan protes atau kritik, jangan sampai janji kampanye berupa Makan Siang Gratis itu menggerus, mengganggu, dan mengotak-atik program BOS yang seharusnya fokus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan (PKS, 2024).	Fahmy Alaydroes (Anggota DPR RI Praksi PKS)
3.	Ketergantungan impor bahan pangan	Program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak yang digagas Paslon Capres Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Tom Lembong menilai, gagasan ini kurang tepat. Apalagi Prabowo-Gibran berencana akan impor 1,5 sapi untuk memenuhi kebutuhan susu tersebut (Reliubun, 2024).	Tom Lembong (TIM AMIN)
4.	Sentralisasi menu tidak sesuai kearifan lokal	Program makan siang gratis ini terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah	Faisal Basri (ekonom)

- juga ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, penentuan menu ini juga belum jelas. "Apakah orang lokal, atau dari nasional?" (Rahayu, 2024).
5. Penanganan stunting yang keliru Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka melakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat". Apabila ibu hamil dilakukan pemeriksaan secara rutin, maka akan melahirkan bayi-bayi yang Sehat dan kuat. "Kemudian kalau itu kurang gizi baru bapak benar kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan tumbuh cerdas (Waku, 2024). Ganjar Pranowo (Rival Politik)
  6. Program bersifat politis Masyarakat tidak perlu menunggu Presiden baru untuk bisa mendapatkan makan siang gratis. Masyarakat tidak perlu menunggu Presiden untuk mendapatkan makan siang gratis. "Kalau mau makan siang gratis mah lu orang datang aja ke lokasi syuting, bilang aja asistennya artis," (Ardianto, 2024) Umay (publik figur)
  7. Timing intervensi stunting tidak tepat Solusi kasus stunting bukan hanya memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak. Baginya, program makan siang sudah terlambat untuk menangani stunting. "Penanganannya tidak bisa di masa sekolah. Jadi, nggak cukup dikasih makan siang, sudah terlambat. Nggak cukup, (Jo, 2024). Anies Baswedan (Rival Politik)

---

Sumber: Berita online yang diolah

Tabel 2, mengungkap kompleksitas kontroversi seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Prabowo-Gibran melalui enam narasi kritis yang berkembang di masyarakat. Kritik-kritik tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi utama. Pertama, kritik teknis-operasional menyoroti masalah implementasi seperti alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, ketergantungan pada impor bahan pangan, serta pendekatan sentralistik yang mengabaikan keragaman pangan lokal. Kedua, kritik substantif mempertanyakan efektivitas program dalam penanganan stunting, dimana Ganjar (rival politik pada Pemilu 2024) dan Anies (rival politik pada Pemilu 2024) menekankan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan daripada usia sekolah. Ketiga, kritik politis yang diwakili oleh kalangan selebriti atau publik figur menuding program ini sebagai alat pencitraan belaka.

Pola kontroversi yang muncul menunjukkan ketegangan antara logika populis-electoral dengan prinsip kebijakan publik berbasis bukti. Kritik dari ekonom seperti Faisal

Basri (ekonom) dan politisi oposisi sama-sama mengidentifikasi masalah mendasar dalam desain program, meski dengan penekanan berbeda - mulai dari aspek teknis hingga filosofis tentang peran negara. Yang menarik, perdebatan ini tidak hanya terjadi di tingkat elite, tapi juga di masyarakat umum seperti terlihat dalam poin pertama yang mempertanyakan prioritas anggaran.

## Pembahasan

Pesta demokrasi di Indonesia selalu menjadi hal penting yang dinantikan oleh seluruh warga negara Indonesia setiap lima tahun (Goldwen, 2023). Pemilihan umum sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi, seringkali diwarnai dengan berbagai intrik dan strategi politik untuk memenangkan hati pemilih (Kartini & Sanusi, 2022). Salah satu fenomena yang kerap muncul adalah penggunaan program-program populis sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas kandidat (Umagapi, 2021). Program-program populis, yang seringkali menjanjikan manfaat langsung bagi masyarakat, menjadi daya tarik tersendiri dalam kampanye politik. Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 menjadi contoh nyata bagaimana isu kesejahteraan sosial dapat diangkat menjadi komoditas politik (Mietzner, 2014). Namun, implementasi program populis seperti ini seringkali memicu perdebatan mengenai akuntabilitas, efektivitas, dan potensi distorsi dalam alokasi sumber daya publik, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang etika politik dan integritas proses demokrasi. Demokrasi dan civil society memiliki keterkaitan erat sebagai dua sisi mata uang yang saling mendukung (Wulandari, 2024).

Studi ini mendiskusikan Program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan utama dalam diskusi ini, karena menawarkan lensa yang menarik untuk memahami dinamika antara populisme, kebijakan publik, dan kepentingan elektoral dalam konteks politik Indonesia. Para peserta pemilu menggunakan populisme dalam kampanye sebagai gaya diskursif (Ritonga & Adela, 2020). Dengan mengkaji lebih dalam narasi, janji, dan kritik seputar program ini, studi ini memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana isu-isu sosial dan ekonomi dimobilisasi dalam arena politik, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Yilmaz et al., 2024) (Yilmaz et al., 2024). Sebagaimana temuan penelitian ini, menunjukkan para tim kampanye secara sistematis membingkai MBG sebagai solusi multiguna yang menjawab berbagai masalah nasional, mulai dari penanganan stunting dan gizi buruk, peningkatan prestasi siswa, penguatan industri pangan, hingga penghematan keuangan keluarga. Narasi ini dirancang untuk menyasar segmen pemilih spesifik, dari ibu rumah tangga hingga pelaku usaha dan kalangan pendidikan.

Dalam perkembangannya, program Makan Bergizi Gratis sebagai program populis mendapatkan respon beragam dari masyarakat dan menimbulkan kontroversi terkait efektivitas, sumber pendanaan, dan potensi dampaknya terhadap anggaran negara. Kompleksitas kontroversi seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Prabowo-Gibran melalui narasi kritis yang berkembang di masyarakat. Kritik-kritik tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi utama. Pertama, kritik teknis-operasional menyoroti masalah implementasi seperti alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, ketergantungan pada impor bahan pangan, serta pendekatan sentralistik yang mengabaikan keragaman pangan lokal. Kedua, kritik substantif mempertanyakan

efektivitas program dalam penanganan stunting, dimana Ganjar (rival politik pada Pemilu 2024) dan Anies (rival politik pada Pemilu 2024) menekankan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan daripada usia sekolah. Ketiga, kritik politis yang diwakili oleh kalangan selebriti atau publik figur menuding program ini sebagai alat pencitraan belaka.

Politisasi kebijakan sosial dalam pemilu telah menjadi fenomena yang dapat ditemukan di berbagai negara demokrasi (Sulityaningtyas et al., 2014). Namun demikian, politisasi ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti fragmentasi sosial, polarisasi politik, dan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi (Asrin et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang program-program yang ditawarkan oleh kandidat, serta mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan negara.

## SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini mendiskusikan dua poin utama yaitu praktik penggunaan program sosial sebagai komoditas politik serta dampak dari populisme elektoral di Indonesia. Politisasi program Makan Bergizi Gratis dalam Pemilu 2024 di Indonesia telah memunculkan perdebatan sengit di berbagai kalangan. Program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis seringkali menjadi daya tarik utama bagi pemilih, narasi kampanye yang kuat dapat mempengaruhi opini publik dan preferensi politik.

Selain itu terdapat respon beragam dari masyarakat dan menimbulkan kontroversi terkait efektivitas, sumber pendanaan, dan potensi dampaknya terhadap anggaran negara. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik dan kritis terhadap janji-janji kampanye, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin terpilih. Pemilu yang demokratis seharusnya tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas memerlukan dukungan faktor-faktor penting, termasuk kebebasan informasi yang memungkinkan pemilih mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.

Studi ini terbatas pada analisis terhadap diskursus publik dan opini media terkait Program Makan Bergizi Gratis, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak riil dari program ini setelah diimplementasikan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. M. (2024, February 16). *Klarifikasi soal Program Makan Siang Gratis, TKN: Langsung Dijalankan Setelah Prabowo-Gibran Dilantik*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/15182831/klarifikasi-soal-program-makan-siang-gratis-tnk-langsung-dijalankan-setelah>
- Advertorial. (2024, February 4). *Program Makan Siang Gratis Solusi untuk Kesehatan & Sosial-Ekonomi*. CNN Indonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240204164403-293-1058359/program-makan-siang-gratis-solusi-untuk-kesehatan-sosial-ekonomi>
- Anggrainy, F. C. (2024, February 16). *Budiman Ungkap Persiapan Program Makan Siang Gratis, Begini Rinciannya*. Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7197367/budiman-ungkap-persiapan-program-makan-siang-gratis-begini-rinciannya>

- Ardianto, W. (2024, February 7). *Sosok Umay, Berani Kritik Program Makan Siang Gratis Milik Prabowo Gibran*. Naker News.Com. <https://www.naker.news/news/1991002949/sosok-umay-berani-kritik-program-makan-siang-gratis-milik-prabowo-gibran>
- Arsyad, Y., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2023). Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Gorontalo. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 160. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.40398>
- Asrin, A., Nur Achmad, F. Y., & Sadat, A. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI PADA KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BAADIA KOTA BAUBAU. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 108. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i2.3179>
- Ayu, R. D. (2024, March 1). *4 Tujuan Utama Program Makan Siang Gratis ala Prabowo*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/4-tujuan-utama-program-makan-siang-gratis-ala-prabowo-81928>
- Blattman, C., Emeriau, M., & Fiala, N. (2018). Do Anti-Poverty Programs Sway Voters? Experimental Evidence From Uganda. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 891–905. [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_00737](https://doi.org/10.1162/rest_a_00737)
- Brown, D. S., Brown, J. C., & Donaghy, M. M. (2011). The Electoral Consequences of Direct Political Action: Evidence From Brazil. *Latin American Politics and Society*, 53(04), 35–66. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2011.00133.x>
- Ekawati, E. (2019). Peta koalisi partai-partai politik di Indonesia pada pemilihan presiden dan wakil presiden pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160.
- Ezrow, L., & Krause, W. (2022). Voter Turnout Decline and Party Responsiveness. *British Journal of Political Science*, 53(1), 85–103. <https://doi.org/10.1017/s0007123421000673>
- Fleckenstein, T. (2010). Party Politics and Childcare: Comparing the Expansion of Service Provision in England and Germany. *Social Policy and Administration*, 44(7), 789–807. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2010.00744.x>
- Gerindra.id. (2023, November 28). *Hari Pertama Kampanye, Prabowo-Gibran Luncurkan Program Makan Siang dan Minum Susu Gratis untuk Anak Sekolah*. Gerindra.Id. <https://gerindra.id/2023/11/28/hari-pertama-kampanye-prabowo-gibran-luncurkan-program-makan-siang-dan-minum-susu-gratis-untuk-anak-sekolah/>
- Goldwen, F. (2023). The Urgency of Implementing an Appropriate Legislative Election System in Democracy Development in Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 637–643. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.550>
- Grehenson, G. (2014, May 26). *Bantuan Sosial Jelang Pemilu Mempengaruhi Perilaku Pemilih*. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/9005-bantuan-sosial-jelang-pemilu-mempengaruhi-perilaku-pemilih/>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). Neo-Liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox. *The Journal of Development Studies*, 41(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/0022038042000309223>
- Jo, B. (2024, February 6). *Daftar Kritik Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran*. Tirto.Id. <https://tirto.id/daftar-kritik-soal-program-makan-siang-gratis-prabowo-subianto-gvls>
- Jogja, H. (2024, January 27). *Program Makan Siang Gratis untuk Anak SD-SMA Bantu Ibu Rumah Tangga*. Harian Jogja.Com. <https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/01/27/643/1162946/program-makan-siang-gratis-untuk-anak-sd-sma-bantu-ibu-rumah-tangga>
- Kartini, M., & Sanusi, S. (2022). Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya. *Hukum Responsif*, 13(1), 134. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>

- McCarthy, J. F., & Sumarto, M. (2018). Distributional Politics and Social Protection in Indonesia: Dilemma of Layering, Nesting and Social Fit in Jokowi's Poverty Policy. *Southeast Asian Economies*, 35(2), 223–236. <https://doi.org/10.1355/ae35-2g>
- Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy*, 25(4), 111–125. <https://doi.org/10.1353/jod.2014.0073>
- Miles Matthew, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nieto-Matiz, C., & Skigin, N. (2020). *The Unintended Consequences of Democratic Reforms: Electronic Voting and Criminal Violence in Brazil*. <https://doi.org/10.33774/apsa-2020-663v0-v2>
- Nushratu, H. (2024, February 10). *Relawan Gibran Sosialisasikan Program Makan Siang Gratis Paslon 02 di Papua*. Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7186005/relawan-gibran-sosialisasikan-program-makan-siang-gratis-paslon-02-di-papua>
- PKS, H. P. (2024, March 6). *Tanggapi Wacana Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Aleg PKS: Kami Protes dan Tolak Keras*. Humas Praksi PKS.Com. <https://fraksi.pks.id/2024/03/06/tanggapi-wacana-dana-bos-untuk-program-makan-siang-gratis-aleg-pks-kami-protes-dan-tolak-keras%e2%80%bc%ef%b8%8f/>
- Pratiwi, P. (2021). *Deliberasi Untuk Demokrasi Pasca Pandemi Indonesia*. *Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(2). <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.726>
- Puspapertiwi, E. R., & Nugroho, R. S. (2024, February 19). *Program Makan Siang Gratis Prabowo, Siapa Saja yang Dapat dan dari Mana Uangnya?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/19/203000065/program-makan-siang-gratis-prabowo-siapa-saja-yang-dapat-dan-dari-mana?page=all>
- Rahayu, R. (2024, March 5). *Kritik Program Makan Siang Gratis Prabowo, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/kritik-program-makan-siang-gratis-prabowo-faisal-basri-perencanaan-acak-acakan-80815>
- Rahmatunnisa, M. (2015). *Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi*. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 505–522.
- Ramadhanty, D. A. (2024, March 1). *Pro Kontra Program Makan Gratis Prabowo-Gibran di Masyarakat*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/01/17011561/pro-kontra-program-makan-gratis-prabowo-gibran-di-masyarakat>
- Reliubun, I. (2023, December 29). *TKN Prabowo-Gibran Jelaskan Manfaat Program Makan Siang Gratis yang Dkiritik Ganjar Pranowo*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/tkn-prabowo-gibran-jelaskan-manfaat-program-makan-siang-gratis-yang-dkiritik-ganjar-pranowo-103239>
- Reliubun, I. (2024, January 29). *Kritik Program Makan Siang dan Bagi Susu Gratis ala Prabowo, Anies - Muhaimin Pilih Genjot Industri Perikanan*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/kritik-program-makan-siang-dan-bagi-susu-gratis-ala-prabowo-anies-muhaimin-pilih-genjot-industri-perikanan--88679>
- Ritonga, A. D., & Adela, F. P. (2020). *Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 (Observing Prabowo's Populism as a Form of Discursive Style During Political Campaigns in the 2019 Presidential Election)*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4156045>
- Salam, H. (2024, January 6). *Kampanyekan Program Makan Siang Gratis, Prabowo Targetkan Menang Satu Putaran*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/06/kampanyekan-program-makan-siang-gratis-prabowo-targetkan-menang-satu-putaran>
- Salsabila Zahratu, N., Jacqueline Fiandie, U., & Triadi, I. (n.d.). *Analisis Dinamika Masyarakat Dalam Berdemokrasi di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi Dalam Pemilihan Umum*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 667. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12597938>

- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id Di Indonesia. *Cosmogov*, 5(2), 204. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>
- Sulityaningtyas, T., Suganda, D., Sobarna, C., & Wahya, W. (2014). Representation of Legislative Member Candidates of Partai Demokrat on Their Outdoor Political Advertising. *International Journal of Linguistics*, 6(2), 286. <https://doi.org/10.5296/ijl.v6i2.5553>
- Umagapi, J. L. (2021). Politik Klientelisme di Pemilu Serentak 2019. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11(1), 23–46. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.23-46>
- Waku, F. (2024, February 3). *Ganjar Sentil Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Jangan Sampai Bikin Obesitas*. *Tribun News.Com*. <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/02/05/ganjar-sentil-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-jangan-sampai-bikin-obesitas>.
- Wijanarko, R. (2021). Religious Populism and Public Sphere in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 0(0), 1. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.8547>
- Wulandari, S. (2024). *Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0*. 4(2), 51–61. <https://doi.org/10.31294/jpr.v4i2.3182>
- Yilmaz, I., Triwibowo, W., Bachtar, H., & Barton, G. (2024). *Competing Populisms, Digital Technologies and the 2024 Elections in Indonesia*. <https://doi.org/10.55271/pp0029>